



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)

DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang- ....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi ....

Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di

Lingkungan 

Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
    - a. Tim Manajemen Perubahan,
    - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan,
    - c. Tim Penguatan Organisasi/Kelembagaan,
    - d. Tim Penataan Tata Laksana,
    - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia,
    - f. Tim Penguatan Akuntabilitas,
    - g. Tim Pengawasan, dan
    - h. Tim Pelayanan Publik.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang  
Pada tanggal : 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Azhar



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**  
**KOTA SABANG**  
**NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN**  
**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU**  
**WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN**  
**WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)**  
**DI LINGKUNGAN KIP KOTA SABANG**

**STRUKTUR TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**  
**MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)**  
**DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG**

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	Akmal Said	Ketua	Pengarah	Pengarah merangkap Ketua
2.	Muallim Hasibuan, S.H.I., M.H.	Anggota	Pengarah	Pengarah merangkap Anggota
3.	Azman, S.E.	Anggota	Pengarah	Pengarah merangkap Anggota
4.	Muhammad Yani, S.I.P.	Anggota	Pengarah	Pengarah merangkap Anggota
5.	Anisah	Anggota	Pengarah	Pengarah merangkap Anggota
<b>PELAKSANA</b>				
6.	Teuku Taufiq, S.Sos. 197002121991031004	Sekretaris	Ketua	Penanggung Jawab Tim Pelaksana
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
7.	Ibnu Hanjan, S.IP. 198301122009121001	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Kota Sabang;</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</li> </ul>
8.	Mauladisa 198401032008011002	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
9.	Susilawati, S.Kom. 198605292024212018	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	
<b>II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
10.	Azhar, S.H., M.H. 19850827 200902 1 003	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan identifikasi Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KIP Kota Sabang;</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis di lingkungan KIP Kota Sabang.</li> </ul>
11.	Faisal, S.E. 197303122002121004	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
12.	Cut Rauzatul Jannah. TS, S.H. 199906162025062007	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
<b>III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>				
13.	Muhammad Ihsan, S.H. 196905021990031005	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.</li> </ul>
14.	Novira Erisna, S.IP. 199211272019032013	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
15.	Ferdy Nikmatullah, S.T. 1998091920250610003	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
<b>IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
16.	Muhammad Ihsan, S.H. 196905021990031005	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business;</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.</li> </ul>
17.	Firman Kurniawan S 198303222010011013	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	
18.	Ria Fazriah, A.Md.,Pel. 198509252025212023	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	



<b>V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
19.	Adam Maulana, S.H. 197703222009121001	Kasubbag Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
20.	Erika Diana, S.E. 199106062020122007	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
21.	Indra Syahputra 197805052007011007	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
<b>VI. TIM PENGAWASAN</b>				
22.	Azhar, S.H., M.H. 19850827 200902 1 003	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
23.	Devi Afrizal 198304062007011001	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
24.	Teuku Iradat Al-Hafidhayani, S.H. 200210192025061002	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan-Undangan	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
25.	Ibnu Hanjan, S.I.P. 198301122009121001	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KIP Kota Sabang.
26.	Rara Paramitha, A.Md. 198806092009122001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
27.	Haris Yusran 198301062012121002	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
<b>VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
28.	Adam Maulana, S.H. 197703222009121001	Kasubbag Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
29.	Erika Diana, S.E. 199106062020122007	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
30.	Indra Syahputra 197805052007011007	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Azhar

